

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 191/PMK.03/2014 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa ketentuan mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013;
- b. bahwa terhadap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam huruf a terdapat perubahan jenis data dan informasi yang harus disampaikan dan penambahan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, penambahan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, serta rincian jenis data dan informasi dilakukan dengan mengubah Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 132/PMK.03/2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

Pasal I

Mengubah angka 10, 13, 17, 25, 26 dan 29 serta menambah 22 (dua puluh dua) angka yaitu angka 40 sampai dengan angka 61 pada kolom 1 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013, sehingga angka 10, 13, 17, 25, 26 dan 29 serta angka 40 sampai dengan angka 61 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1457



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191/PMK.03/2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN
INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN
INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

**Daftar Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain,
Rincian Jenis Data dan Informasi, Bentuk Data, Cara dan Jadwal Penyampaian**

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	I. Data Izin Prinsip Penanaman Modal, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Permohonan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi	Izin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Izin Usaha untuk berbagai Sektor Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Permohonan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi	Adalah izin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan
		III. Data Izin Usaha Perluasan untuk berbagai Sektor Usaha, yang paling sedikit memuat:	Izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Permohonan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi	menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha.				
		IV. Data Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan	Izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Permohonan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi					
		V. Data Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara	Izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Jenis Permohonan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi					
		VI. Data Izin Usaha Perubahan untuk berbagai Sektor Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Permohonan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek	Izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Valuta 12. Nilai Investasi					
		VII. Data Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai Sektor Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Permohonan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi	Izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VIII. Data Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Identitas/jenis mesin 7. Nilai legalisasi	Persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan
		IX. Data Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Jenis barang dan bahan	Persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Kuantitas/Nilai Barang dan Bahan					
13	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	I. Laporan Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Nama Kapal 3. Ukuran Kapal 4. Bendera Kapal 5. Pelabuhan Asal 6. Tanggal Kedatangan 7. Pelabuhan Tujuan 8. Tanggal Keberangkatan 9. Bongkar/Muat 10. Ekspor/Impor 11. Jenis Muatan 12. Tonase 13. Nama Perusahaan Bongkar Muat	Laporan bulanan yang menunjukkan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang dilaporkan oleh Otoritas Pelabuhan Utama/KSOP/Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	Elektronik	Online	1 September 2013 (Data Januari s.d Juli 2013)	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Pelabuhan di seluruh Indonesia	Data seluruh pelabuhan di Indonesia di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan
		III. Data Surat Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor SIUPAL 2. Tanggal SIUPAL 3. Nama Perusahaan 4. NPWP Perusahaan 5. Alamat Domisili 6. Nama Penanggung Jawab 7. Alamat Penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (data tahun 2001 s/d Oktober 2014)	Tahunan (bulan Februari tahun berikutnya)
		IV. Data Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS), yang		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (data tahun 2001	Tahunan (bulan Februari tahun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		paling sedikit memuat: 1. Nomor SIOPSUS 2. Tanggal SIOPSUS 3. Nama Perusahaan 4. NPWP Perusahaan 5. Alamat Domisili 6. Nama Penanggung Jawab 7. Alamat Penanggung jawab				s/d Oktober 2014)	berikutnya)
		V. Data Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP Perusahaan 5. Alamat Perusahaan 6. Masa Berlaku 7. Nama Penanggung jawab 8. NIK Penanggung Jawab		Elektronik	Langsung (<i>email</i>)	1 Desember 2014 (data mulai Januari 2014 s/d Oktober 2014)	Tahunan (bulan Februari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VI. Pendaftaran Hak Milik Kapal, yang paling sedikit memuat: 1. Nama kapal 2. Nama kapal sebelumnya 3. <i>Gross Tonnage/Net Tonnage</i> kapal 4. Jenis kapal 5. Tempat pendaftaran kapal 6. Tanggal pendaftaran 7. Tanda pendaftaran 8. Nama pemilik 9. Alamat/Kedudukan pemilik 10. NPWP/NIK pemilik		Elektronik	Langsung (<i>email</i>)	1 Desember 2014 (data mulai Januari 2014 s/d Oktober 2014)	Tahunan (bulan Februari tahun berikutnya)
17	Kementerian Perdagangan	I. Data Profil Pelaku Perizinan Ekspor-Impor di Kementerian Perdagangan RI, yang memuat: 1. Jenis Perizinan 2. Nomor izin	Data ini merupakan profil pelaku untuk seluruh kegiatan perizinan: 1. eksportir terdaftar, 2. persetujuan ekspor 3. Importir terdaftar	Elektronik	<i>Online</i>	1 Agustus 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Tanggal izin 4. Nama Perusahaan 5. NPWP Perusahaan 6. Alamat Perusahaan 7. Penanggung Jawab 8. Negara asal/tujuan 9. Uraian barang 10. Jumlah barang	4. Persetujuan impor				
		II. Data Surat Keterangan Asal (SKA), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor SKA 2. Tanggal SKA 3. Nama perusahaan 4. NPWP perusahaan 5. Alamat perusahaan 6. Negara tujuan 7. Uraian barang 8. Volume barang 9. Nilai barang		Elektronik	Online	1 Agustus 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Data Angka Pengenal Importir (API), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor API 2. Tanggal API 3. Nama perusahaan 4. NPWP perusahaan 5. Alamat perusahaan 6. Nomor akta pendirian/Notaris 7. Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 8. Referensi Bank Devisa 9. Jenis barang/jasa 10. Surat Izin Usaha Perdagangan/izin usaha lain yang sejenis		Elektronik	Online	1 Agustus 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
		IV. Tanda Pendaftaran, yang memuat: 1. Nama Perusahaan	Jenis tanda pendaftaran meliputi: a. Surat Tanda Pendaftaran	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Alamat Perusahaan 3. Penanggung Jawab (tertera dalam Akte) 4. Keterangan lainnya a. Nama prinsipal (khusus untuk Surat Tanda Pendaftaran Agen/ Distributor barang dan atau Jasa Produksi Dalam/Luar Negeri) b. Penerima Waralaba dan Merk Waralaba (khusus untuk Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) c. Asal barang (khusus Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi	Agen Atau Distributor Barang dan atau Jasa Produksi Dalam/Luar Negeri b. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba c. Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Purna Jual dalam Bahasa Indonesia)					
		V. Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Penanggung Jawab (tertera dalam Akte) 5. Modal dasar		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan
		VI. Data Izin Wakil Pialang Berjangka, yang memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Wakil Pialang Berjangka 4. Nama Perusahaan Pialang Berjangka	Data ini merupakan izin untuk melakukan kegiatan sebagai wakil pialang berjangka	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Alamat wakil pialang berjangka 6. Lokasi/alamat penempatan kantor Wakil Pialang Berjangka 7. Nomor KTP wakil pialang berjangka					
		VII. Data Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka, yang memuat: 1. Perseorangan a. Nomor Izin b. Tanggal Izin c. Nama pedagang berjangka d. Alamat pedagang berjangka 2. Perusahaan a. Nomor Izin b. Tanggal Izin	Data ini merupakan izin untuk melakukan kegiatan sebagai pedagang berjangka	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Nama pedagang berjangka d. Alamat pedagang berjangka e. Nomor telepon dan faksimile					
		VIII. Data Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI), yang memuat: 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Status Perusahaan (Produsen/Importir) 5. Penanggung jawab perusahaan 6. Nomor telepon/ faksimile/ email		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	I. Data Cadangan atas Minyak Bumi dan Gas Bumi Per wilayah	Informasi data cadangan terbukti atas minyak bumi dan gas bumi per wilayah	Elektronik	Langsung	1 Desember 2013	Tahunan (setiap akhir bulan April tahun berikutnya)
		II. Data Penjualan Ekspor dan Pembelian Impor kegiatan hilir	Data ekspor dan impor per jenis produk kilang	Elektronik	Langsung	1 Desember 2013	Tahunan (setiap akhir bulan April tahun berikutnya)
		III. Data daftar harga sumber daya energi	Informasi harga sumber daya energi berdasarkan tipenya (Indonesia Crude Price)	Elektronik	Langsung	1 Desember 2013	Bulanan (setiap akhir bulan berikutnya)
26	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan	I. Data Kontrak Migas Aktif (per wilayah kerja), paling sedikit memuat : 1. Nama Kontraktor	Data Tahunan kontrak migas aktif yang memuat data wilayah kerja migas	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat bulan April tahun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Gas Bumi (SKK Migas)	2. Nama Operator 3. NPWP Operator 4. Alamat Operator 5. <i>Persentase Interest</i> 6. Tanggal kontrak ditandatangani 7. Tanggal kontrak berakhir 8. Wilayah Kerja 9. Status Wilayah Kerja (Eksplorasi/Eksploitasi)					berikutnya)
		II. Data <i>Plan of Development (PoD)</i> 1. Surat persetujuan PoD Pertama dari satu wilayah kerja (<i>scanned documents</i>) mulai tahun 2009 2. Surat persetujuan PoD dari satu wilayah kerja	<i>Plan of Development (PoD)</i> Pertama dari satu wilayah kerja <i>Plan of Development (PoD)</i> dari satu wilayah kerja yang telah	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat bulan April tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(<i>scanned documents</i>) sebelum tahun 2009 berdasarkan permintaan DJP	disetujui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi				
		III. <i>Data Work Program and Budget (WP & B)</i> revisi, yang paling sedikit memuat : 1. Nama KKKS 2. NPWP Operator 3. Alamat Operator 4. Nama Wilayah Kerja 5. Jenis biaya yang dikeluarkan (<i>exploration, development, production, General Administration</i>) 6. Jumlah biaya	Data Tahunan <i>Work Program and Budget (WP & B)</i> revisi yang telah disetujui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (setiap awal bulan Desember tahun yang bersangkutan)
		IV. <i>Closed Out AFE (Authorization For Expenditure)</i> , paling sedikit memuat :	Data persetujuan <i>Closed Out AFE</i> yang dikeluarkan oleh	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat bulan April)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Nama KKKS 2. NPWP KKKS 3. Alamat KKKS 4. Nama Wilayah Kerja 5. Nama Proyek 6. Nomor AFE 7. Nomor & tanggal surat persetujuan AFE 8. Nilai persetujuan (Nominal)	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi				tahun berikutnya)
		V. Data <i>Financial Quarterly Report (FQR)</i> - Terpisah Minyak & Gas, paling sedikit memuat : 1. Nama KKKS 2. NPWP KKKS 3. Alamat KKKS 4. Nama Wilayah Kerja 5. <i>Lifting</i> (Volume) 6. <i>Gross Revenue</i>	Data FQR Final dan FQR Hasil Verifikasi oleh SKK Migas yang menjadi dasar perhitungan <i>over/under lifting</i> setiap tahun oleh setiap KKKS Migas	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat tanggal 1 Juli tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. <i>First Tranche Petroleum</i> (FTP) 8. <i>Cost Recovery</i> 9. <i>Investment Credit</i> 10. <i>Interest Cost Recovery</i> 11. <i>Government Share</i> 12. <i>Contractor share:</i> 13. <i>FTP share</i> 14. <i>Equity share</i> 15. <i>Lifting Price Variance</i> 16. <i>Domestic Market</i> <i>Obligation (DMO)</i> 17. <i>DMO Fee</i> 18. Bonus 19. Tarif Pajak (persentase) 20. PPs & PBDR					
		VI. Data PPN <i>Reimbursement</i> (per NPWP & Nama KKKS), paling sedikit memuat :	Data Triwulan Permohonan Pembayaran kembali PPN/PPnBM yang disampaikan	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Triwulanan (Setiap akhir bulan)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Nama Vendor 2. NPWP Vendor 3. Alamat Vendor 4. Nomor Faktur 5. Tanggal Faktur 6. Nilai PPN (Nominal) 7. Uraian / Jenis Transaksi	KKKS kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi				berikutnya setelah triwulan)
		VII. Data Pengalihan <i>Interest</i> , paling sedikit memuat : 1. Nama yang mengalihkan 2. NPWP yang mengalihkan 3. Alamat yang mengalihkan 4. Nama penerima <i>interest</i> 5. NPWP penerima <i>interest</i> 6. Alamat penerima <i>interest</i> 7. Nama Operator 8. NPWP Operator 9. Alamat Operator 10. Tanggal Pengalihan	Informasi data pengalihan <i>interest</i>	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat bulan April tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<i>(Deed of Assignment)</i> 11. Surat Persetujuan Dirjen Migas (No. surat & tanggal) 12. Persentase yang dialihkan 13. Wilayah yang dialihkan 14. Nilai pengalihan/ ekuivalen					
		VIII. Data Produksi per tahun, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. NPWP perusahaan (Operator) 3. Alamat perusahaan 4. Besarnya hasil produksi	Besarnya hasil produksi meliputi minyak dan gas bumi	Elektronik	Langsung	1 Desember 2013	Tahunan (setiap akhir bulan April tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	I. Data penginderaan jauh yang diterima stasiun bumi LAPAN, meliputi: 1. Data Resolusi Menengah Landsat 5, 2. Data Resolusi Menengah Landsat 7, 3. Data Resolusi Menengah Landsat 8, 4. Data Resolusi Tinggi SPOT 5, dan 5. Data Resolusi Tinggi SPOT 6		Elektronik	Langsung	1 Februari 2014	Semesteran
		II. Data penginderaan jauh yang dimiliki LAPAN melalui pengadaan/pembelian data, meliputi: 1. Data resolusi tinggi <i>World View</i> ;		Elektronik	Langsung	1 Februari 2014	Semesteran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Data resolusi tinggi <i>Quick Bird</i> ; 3. Data resolusi tinggi <i>GeoEye</i> ; 4. Data resolusi tinggi <i>Pleiades</i> .					
40	Kementerian Pekerjaan Umum	Data Pemenang Lelang, yang terdiri dari: 1. NPWP 2. Nama Pemenang 3. Alamat 4. Nomor Telepon 5. Jenis Usaha 6. Tanggal Izin Usaha 7. Masa Berlaku Izin Usaha 8. Nama Paket Pekerjaan 9. Lokasi Paket Pekerjaan 10. Tanggal Kontrak 11. Nilai Kontrak 12. Tanggal Surat Perintah	Jenis usaha meliputi: 1. Jasa Konstruksi 2. Jasa Konsultan 3. Penyedia barang/jasa lainnya	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat 7 hari kerja setelah akhir triwulan)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mulai Kerja 13. Masa Pelaksanaan					
41	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	I. Data Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), yang paling sedikit memuat: 1. Nama badan hukum 2. NPWP badan hukum 3. Alamat badan hukum 4. Nama LKP 5. Alamat LKP 6. Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) 7. Tanggal berdiri LKP 8. Alamat <i>email</i> LKP 9. Alamat <i>website</i> LKP 10. Nomor telepon LKP 11. Nomor <i>fax</i> LKP 12. Nama pimpinan LKP 13. NIK <u>pimpinan</u> LKP		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Sertifikasi Guru, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Guru 2. Alamat rumah 3. Tempat & Tanggal Lahir Guru 4. NPWP Guru 5. NIK Guru 6. Nomor Registrasi Guru (NRG) 7. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 8. Nama Instansi Tempat Mengajar 9. Alamat Instansi Tempat Mengajar	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)
		III. Data Sertifikasi Dosen, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Dosen	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Alamat rumah 3. Tempat & Tanggal Lahir Dosen 4. NPWP Dosen 5. NIK Dosen 6. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 7. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 8. Nama Instansi Tempat Mengajar 9. Alamat Instansi Tempat Mengajar	dimiliki				berikutnya)
		IV. Data Penerima Dana Bantuan Sosial, yang paling sedikit memuat: 1. Nama badan hukum 2. NPWP badan hukum 3. Alamat badan hukum	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Status penerima Bantuan Sosial (Komunitas Budaya/Sekolah Negeri/Sekolah Swasta/Lembaga Peduli Pendidikan) 5. Tanggal pendirian 6. Alamat <i>email</i> 7. Alamat <i>website</i> 8. Nomor telepon 9. Nomor Faksimile 10. Nama pimpinan 11. NIK pimpinan 12. Nama Program Bantuan Sosial 13. Nilai Bantuan Sosial					
42	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian	I. Data Pembuatan Paspor, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pemegang Paspor		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Hukum dan HAM	2. Nomor Paspor 3. Alamat Pemegang Paspor 4. Nomor KTP/NIK Pemegang Paspor 5. NPWP Pemegang Paspor					
		II. Data Persetujuan Visa WNA, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pemegang Visa 2. Nomor Paspor 3. Kewarganegaraan 4. Tanggal terbit paspor 5. Tanggal berakhir paspor 6. Nama Penjamin 7. Alamat Penjamin 8. NIK Penjamin 9. NPWP Penjamin 10. Jenis Visa		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Data Perlintasan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pelintas Batas 2. Nomor Paspor 3. Tanggal Masuk Melintas 4. Tanggal Keluar Melintas 5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Masuk 6. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Keluar	5. (Pada saat pelintas masuk Indonesia) 6. (Pada saat pelintas keluar Indonesia)	Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran
43	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	I. Data Pendirian Perseroan Terbatas, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perseroan Terbatas 2. NPWP 3. Nomor Akta Pendirian 4. Tanggal Akta Pendirian 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Pendirian		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pendirian 7. Nama Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 8. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 9. Alamat Lengkap 10. Tempat Kedudukan 11. Jangka Waktu Berdirinya 12. Maksud dan Tujuan 13. Kegiatan Usaha 14. Jenis Fasilitas 15. Jumlah Modal Dasar	7. (Jika ada) Akta Perubahan Dalam Rangka Pendirian 10. Kota/Kabupaten 14. PMA/PMDN 15,16,17 Dalam Satuan Mata				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		16. Jumlah Modal Ditempatkan 17. Jumlah Modal Disetor 18. Nama Lengkap pemegang Saham 19. Alamat pemegang Saham 20. NIK Pemegang Saham 21. Nama Anggota Direksi 22. Alamat Anggota Direksi 23. NIK Anggota Direksi 24. Nama Anggota Dewan Komisaris. 25. Alamat Anggota Dewan Komisaris 26. NIK Anggota Dewan Komisaris 27. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum	Uang Rupiah 19, 23, 26 jika orang asing, gunakan Paspor/KITAS/KITAP				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		28. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum					
		II. Data Perubahan Perseroan Terbatas (PT), yang paling sedikit memuat: 1. Perubahan Nama PT 2. NPWP 3. Nomor Akta Perubahan 4. Tanggal Akta Perubahan 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Perubahan 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Perubahan 7. Perubahan Alamat Lengkap 8. Perubahan Tempat	Diisi dalam hal terdapat Data Perubahan	Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan bulan Juni dan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kedudukan 9. Perubahan Jangka Waktu Berdirinya 10. Perubahan Maksud dan Tujuan 11. Perubahan Kegiatan Usaha 12. Perubahan Jenis Fasilitas 13. Perubahan Jumlah Modal Dasar 14. Perubahan Jumlah Modal Ditempatkan 15. Perubahan Jumlah Modal Disetor 16. Perubahan Nama Lengkap pemegang Saham 17. Perubahan Alamat pemegang Saham 18. NIK Pemegang Saham	18, 21, 24 jika orang asing,				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		19. Perubahan Nama Anggota Direksi 20. Perubahan Alamat Anggota Direksi 21. NIK Anggota Direksi 22. Perubahan Nama Anggota Dewan Komisaris. 23. Perubahan Alamat Anggota Dewan Komisaris 24. NIK Anggota Dewan Komisaris 25. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 26. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 27. Nomor Pencatatan 28. Tanggal Pencatatan	gunakan Paspor/KITAS/KITAP				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Data Pembubaran Perseroan Terbatas (PT), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Akta Pembubaran 2. Tanggal Akta Pembubaran 3. Nama Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 4. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 5. Nomor penetapan pengadilan atas Pembubaran 6. Tanggal penetapan pengadilan atas Pembubaran 7. Nomor surat Pencatatan Pembubaran 8. Tanggal Surat		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pencatatan Pembubaran 9. Nomor surat berakhirnya Badan Hukum 10. Tanggal surat berakhirnya Badan Hukum					
		IV. Data Pendirian Yayasan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. NPWP 3. Nomor Akta Pendirian 4. Tanggal Akta Pendirian 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Pendirian 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pendirian 7. Nama Notaris yang Membuat akta	Dalam hal yayasan Pendiri/pengurus/pengawas/ pembina jika orang asing, digunakan nomor Paspor/KITAS/KITAP	Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 8. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 9. Alamat Lengkap 10. Tempat Kedudukan 11. Jangka Waktu Berdirinya 12. Maksud dan Tujuan 13. Kegiatan 14. Jumlah Kekayaan Awal 15. Nama Lengkap Pendiri 16. Alamat Pendiri 17. NIK Pendiri 18. Nama Pembina 19. Alamat Pembina 20. NIK Pembina					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		21. Nama Pengurus. 22. Alamat Pengurus 23. NIK Pengurus 24. Nama Pengawas. 25. Alamat Pengawas 26. NIK Pengawas 27. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Yayasan 28. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Yayasan					
		V. Data Perubahan Yayasan, yang paling sedikit memuat: 1. Perubahan Nama Yayasan 2. NPWP 3. Nomor Akta Perubahan		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Tanggal Akta Perubahan 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Perubahan 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Perubahan 7. Perubahan Alamat Lengkap 8. Perubahan Tempat Kedudukan 9. Perubahan Jangka Waktu Berdirinya 10. Perubahan Kegiatan 11. Perubahan Nama Pembina 12. Perubahan Alamat Pembina 13. NIK Pembina (Nomor Paspur dalam hal Orang Asing)	13, 16, 19 jika orang asing, gunakan Paspur/KITAS/KITAP				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		14. Perubahan Nama Pengurus 15. Perubahan Alamat Pengurus 16. NIK Pengurus 17. Perubahan Nama Pengawas. 18. Perubahan Alamat Pengawas 19. NIK Pengawas 20. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 21. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 22. Nomor Pencatatan 23. Tanggal Pencatatan					
		VI. Data Pembubaran Yayasan, yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Nomor Akta Pembubaran 2. Tanggal Akta Pembubaran 3. Nama Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 4. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 5. Nomor penetapan pengadilan atas Pembubaran 6. Tanggal penetapan pengadilan atas Pembubaran 7. Nomor surat Pencatatan Pembubaran 8. Tanggal Surat Pencatatan Pembubaran					akhir bulan Juni dan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VII. Data Pendirian Perkumpulan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perkumpulan 2. NPWP 3. Nomor Akta Pendirian 4. Tanggal Akta Pendirian 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Pendirian 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pendirian 7. Nama Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 8. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam	Dalam hal yayasan Pendiri/pengurus/pengawas/ pembina jika orang asing, digunakan nomor Paspor/KITAS/KITAP	Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		rangka pendirian 9. Alamat Lengkap 10. Tempat Kedudukan 11. Jangka Waktu Berdirinya 12. Maksud dan Tujuan 13. Kegiatan Perkumpulan 14. Nama Lengkap Pendiri 15. Alamat Pendiri 16. NIK Pendiri 17. Nama Pengurus 18. Alamat Pengurus 19. NIK Pengurus 20. Nama Pengawas 21. Alamat Pengawas 22. NIK Pengawas 23. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan 24. Tanggal Keputusan					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan					
		VIII. Data Perubahan Perkumpulan, yang paling sedikit memuat: 1. Perubahan Nama Perkumpulan 2. NPWP 3. Nomor Akta Perubahan 4. Tanggal Akta Perubahan 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Perubahan 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Perubahan 7. Perubahan Alamat Lengkap	Dalam hal yayasan Pendiri/pengurus/pengawas/ pembina jika orang asing, digunakan nomor Paspor/KITAS/KITAP	Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Perubahan Tempat Kedudukan 9. Perubahan Jangka Waktu Berdirinya 10. Perubahan Maksud dan Tujuan 11. Perubahan Kegiatan Perkumpulan 12. Perubahan Nama Pengurus 13. Perubahan Alamat Pengurus 14. NIK Pengurus 15. Perubahan Nama Pengawas 16. Perubahan Alamat Pengawas 17. NIK Pengawas 18. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		19. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 20. Nomor Pencatatan 21. Tanggal Pencatatan					
		IX. Data Pembubaran Perkumpulan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Akta Pembubaran 2. Tanggal Akta Pembubaran 3. Nama Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 4. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 5. Nomor penetapan pengadilan atas Pembubaran		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tanggal penetapan pengadilan atas Pembubaran 7. Nomor surat Pencatatan Pembubaran 8. Tanggal Surat Pencatatan Pembubaran					
		X. Data Notaris, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Notaris 2. Tempat Lahir Notaris 3. Tanggal Lahir Notaris 4. Alamat Rumah Notaris 5. NPWP 6. NIK Notaris 7. Alamat Kantor 8. Wilayah Kerja Notaris 9. Nomor SK Pengangkatan Sebagai Notaris 10. Tanggal SK		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengangkatan Sebagai Notaris 11. Tanggal Berita Acara Sumpah (tanggal berlakunya melaksanakan jabatan sebagai Notaris) 12. Nomor SK Perpindahan Wilayah Kerja sebagai Notaris (apabila ada) 13. Tanggal SK Perpindahan Wilayah Kerja sebagai Notaris (apabila ada) 14. Nomor Telepon dan <i>fax</i>					
44	Kementerian Perindustrian	Data Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) Kendaraan Bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan		Elektronik	Online	10 Oktober 2014	Triwulanan (setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. NPWP Perusahaan 4. Merek 5. Tipe Kendaraan 6. Jenis Kendaraan 7. Kapasitas Silinder (CC) 8. Jenis TPT 9. Jumlah Impor 10. Realisasi Impor 11. Nomor TPT 12. Tanggal terbit TPT	8. Jenis TPT meliputi : 1. Uji Tipe 2. Impor 3. Produksi				
45	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	I. Data Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (SIUAU/NB), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama 4. NPWP 5. Alamat Domisili Perusahaan		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Nama Penanggung jawab (Direktur Utama) 7. Alamat Penanggung jawab					
		II. Data Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (SIUAU/NTB), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama 4. NPWP 5. Alamat Domisili 6. Nama Penanggung jawab (Direktur Utama) 7. Alamat Penanggung jawab		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari)
		III. Data Produksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. NPWP Perusahaan 2. Nama Perusahaan 3. <i>Aircraft Km</i> 4. <i>Aircraft departure</i> 5. <i>Aircraft hours</i> 6. <i>Passenger carried</i> 7. <i>Freight carried</i> (dalam ton) 8. <i>Passenger Km</i> 9. <i>Available Seat Km</i> 10. <i>Passenger Load Factor</i> (dalam %) 11. <i>Ton Km Performed</i> a. <i>Passenger</i> b. <i>Freight</i> c. <i>Mail</i> d. <i>Total</i> 12. <i>Available Ton Km</i> 13. <i>Weight Load Factor</i> (dalam %)					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. Data Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara, yang paling sedikit memuat: 1. NPWP Perusahaan 2. Nama Perusahaan 3. Tanda Pendaftaran pesawat udara 4. <i>Serial Number</i> pesawat 5. Tipe pesawat 6. <i>Year of manufacturing</i> 7. Tanggal Registrasi 8. Nama pemilik pesawat 9. Alamat pemilik pesawat 10. <i>Lessor</i> pesawat		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari)
46	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan	I. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Surat Keputusan Izin		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 28 Februari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Tanggal Surat Keputusan Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat Domisili 6. Masa Berlaku 7. Nama Direktur 8. Jumlah Armada Bus Antar Kota Antar Provinsi 9. Jumlah Armada Antar Jemput Antar Provinsi					
		II. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Surat Keputusan Izin 2. Tanggal Surat Keputusan Izin 3. Nama Perusahaan		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 28 Februari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. NPWP 5. Alamat Domisili 6. Masa Berlaku 7. Nama Direktur 8. Jumlah Armada Bus Pariwisata 9. Jumlah Armada Taksi khusus Bandara Soekarno Hatta					
		III. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan/atau Alat Berat, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Surat Keputusan Izin 2. Tanggal Surat Keputusan Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat Domisili		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 28 Februari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Masa Berlaku 7. Nama Direktur 8. Jumlah Armada Barang khusus 9. Jumlah Armada Alat Berat					
47	Kementerian Kesehatan	I. Data Izin Penyalur Alat Kesehatan (Alkes) dan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Nama Direktur 7. Nama Penanggung Jawab Teknis	1. Ref. Nomor izin: a. AK.1 (Sertifikat Produksi alkes/PKRT) b. AK.2 (Izin Penyalur alkes)	Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Izin Pedagang Besar Farmasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
		III. Data izin Industri Farmasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
		IV. Data Izin Industri Obat Tradisional, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat					
		V. Data izin Industri Ekstrak Bahan Alam, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
		VI. Data izin Industri Kosmetika, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Alamat					
		VII. Daftar Apotek, yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. Nomor Izin apotek 3. Alamat 4. Nama Apoteker Penanggung Jawab		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
		VIII. Daftar Rumah Sakit teregistrasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Rumah Sakit 2. Jenis Rumah Sakit 3. Kelas Rumah Sakit 4. Alamat Rumah Sakit 5. Direktur 6. Penyelenggara 7. Kab/Kota 8. Kode Pos	6. Penyelenggara: Kemenkes/Propinsi/	Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Telepon 10. Fax 11. Email 12. Telepon Humas 13. Website 14. Data Ijin	kab,kota/swasta				
48	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	I. Daftar BUMN, yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. NPWP 3. Jenis Usaha 4. Alamat Kedudukan 5. Tanggal Izin Usaha 6. Jumlah Cabang	5. Tanggal izin usaha diisi untuk BUMN yang berdiri sejak tahun 2010	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)
		II. Ikhtisar Kinerja BUMN : 1. Nama 2. NPWP 3. Tahun Buku 4. Total Aset		Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Total Penjualan/ Pendapatan 6. Total Biaya (Harga Pokok Penjualan + Beban Usaha) 7. Laba/Rugi Usaha 8. Pendapatan dan Beban Lain-Lain (<i>Netto</i>) 9. Laba/Rugi Bersih 10. <i>Return on Investment</i> (ROI) 11. <i>Return on Asset</i> (ROA)					
		III. <i>Listing</i> Utang Rekening Dana Investasi/ <i>Subsidiary</i> <i>Loan Agreement</i> (RDI/SLA), yang terdiri dari: 1. Nama BUMN 2. NPWP 3. Jumlah Utang		Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. Penyerapan Dana <i>Public Service Obligation</i> (PSO), yang terdiri dari: 1. Nama BUMN 2. NPWP 3. Jumlah Nilai Subsidi		Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)
		V. Data Restrukturisasi Perusahaan BUMN, yang paling sedikit memuat: 1. Data Program <i>Rightsizing</i> BUMN yang terdiri dari: a. Nama BUMN b. NPWP c. Nilai sebelum d. Nilai sesudah 2. Data Program Privatisasi BUMN, yang terdiri dari: a. Nama BUMN b. NPWP c. Persentase Saham		Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang Dilepas d. Metode Privatisasi e. Nilai Privatisasi					
49	Kementerian Agama	I. Data Jemaah Haji Khusus, yang paling sedikit memuat: 1. Nama jemaah haji 2. Alamat jemaah haji 3. NIK jemaah haji 4. Tempat lahir jemaah haji 5. Tanggal lahir jemaah haji 6. Tahun keberangkatan 7. Nama Penyelenggara Ibadah Haji Khusus 8. Alamat Penyelenggara Ibadah Haji Khusus		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Januari)
		II. Data Penyelenggara Haji Khusus, yang paling sedikit memuat: 1. NPWP perusahaan		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Nama perusahaan penyelenggara 3. Alamat perusahaan 4. Nomor Izin 5. Tanggal Izin 6. Masa berlaku izin 7. Jumlah jamaah yang diberangkatkan 8. Tahun keberangkatan 9. Nama penanggung jawab 10. Alamat penanggung jawab 11. NIK penanggung jawab 12. NPWP penanggung jawab					
		III. Data Penyelenggara Umrah, yang paling sedikit memuat: 1. NPWP perusahaan 2. Nama perusahaan		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penyelenggara 3. Alamat perusahaan 4. Nomor Izin 5. Tanggal Izin 6. Masa berlaku izin 7. Nama penanggung jawab 8. Alamat penanggung jawab 9. NIK penanggung jawab 10. NPWP penanggung jawab					
50	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	I. Data Tahunan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang memuat data pertambangan mineral dan batubara meliputi : 1. Nama perusahaan	Data Tahunan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. NPWP perusahaan 3. Alamat perusahaan 4. Persentase kepemilikan 5. Tahapan kegiatan kerja (eksplorasi/eksploitasi) 6. Tanggal kontrak ditandatangani 7. Tanggal kontrak berakhir 8. Luas Wilayah Kerja 9. Lokasi Wilayah Kerja 10. Tanggal kontrak diperpanjang 11. Tanggal berakhirnya Kontrak Perpanjangan					
		II. Data Ijin Usaha Pertambangan (IUP)/Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang	Data IUP/IUPK yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah baik Gubernur/ Bupati/Walikota	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		paling sedikit memuat data : 1. Nama pemegang IUP/IUPK 2. NPWP Pemegang IUP/IUPK 3. Alamat Pemegang IUP/IUPK 4. Kode Wilayah IUP/IUPK 5. Wilayah IUP/IUPK 6. Luas IUP/IUPK 7. Jenis IUP/IUPK yang diterbitkan 8. Instansi Penerbit dari IUP/IUPK (Pusat, Gubernur atau bupati) 9. Tanggal penerbitan IUP/IUPK 10. Jangka waktu penerbitan IUP/IUPK	7. Meliputi IUP/IUPK Eksplorasi atau IUP/IUPK operasi Produksi				
		III. Data pembayaran royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) oleh	Data pembayaran royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data	Tahunan (setiap akhir bulan Januari



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kontraktor Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) oleh masing-masing Kontraktor yang paling sedikit memuat : 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Lokasi Wilayah Pertambangan 5. Luas Wilayah Pertambangan 6. Jenis mineral dan batubara 7. Jumlah produksi 8. Nilai penjualan 9. Jumlah Royalti yang Dibayar 10. Periode Pembayaran Royalti	(DHPB) oleh Kontraktor Kontrak Karya atau PKP2B oleh masing-masing Kontraktor			tahun 2013)	tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IV.Data pembayaran iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi (royalti) oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP)/Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)/Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) baik mineral maupun batubara yang paling sedikit memuat : 1. Nama pemegang IUP/IUPK/IPR 2. NPWP pemegang IUP/IUPK/IPR 3. Alamat pemegang IUP/IUPK/IPR 4. Kode Wilayah IUP/IUPK/IPR 5. Luas Wilayah IUP/IUPK/IPR 6. Lokasi Wilayah	Data pembayaran iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi (royalti) oleh pemegang IUP/IUPK/IUPR baik mineral maupun batubara	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IUP/IUPK/IPR 7. Tahapan kegiatan usaha 8. Jenis mineral dan batubara 9. Jumlah Produksi 10. Nilai Penjualan 11. Jumlah Iuran Tetap 12. Jumlah Iuran Eksplorasi 13. Jumlah Iuran Produksi (Royalti) 14. Periode Pembayaran Iuran					
		V. Data Badan Usaha Jasa Penunjang Pertambangan yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Pusat, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Badan Usaha 2. NPWP Badan Usaha 3. Alamat Badan Usaha 4. Jenis dan bidang usaha	Data Badan Usaha Jasa Penunjang Pertambangan yang telah mendapat ijin dari pemerintah	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang dilakukan 5. Nomor Ijin Usaha 6. Tanggal Ijin Usaha 7. Lokasi usaha					
		VI. Data cadangan terkira/terbukti atas pertambangan mineral dan batubara per wilayah untuk Kontrak Karya dan PKP2B	Informasi data cadangan terkira/terbukti atas pertambangan mineral dan batubara per wilayah kerja	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)
		VII. Data Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara Kontraktor Kontrak Karya dan PKP2B yang paling sedikit memuat : 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Lokasi wilayah pertambangan	Data Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara Kontraktor Kontrak Karya dan PKP2B	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data Semester I tahun 2014)	Semesteran (setiap akhir bulan Januari dan Juli)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Luas wilayah pertambangan 6. Jumlah produksi 7. Nilai penjualan Domestik 8. Nilai penjualan Ekspor 9. Tujuan penjualan Domestik 10. Tujuan penjualan Ekspor 11. Jumlah yang diolah di dalam negeri.	6, 7, 8 Data per bulan atau disesuaikan dengan pembayaran royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)				
		VIII.Data Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara pemegang IUP/IUPK/IPR baik mineral maupun batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memuat : 1. Nama pemegang IUP/IUPK/IPR	Data Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara pemegang IUP/IUPK/IPR baik mineral maupun batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data Semester I tahun 2014)	Semesteran (setiap akhir bulan Januari dan Juli)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. NPWP pemegang IUP/IUPK/IPR 3. Alamat pemegang IUP/IUPK/IPR 4. Lokasi wilayah pertambangan 5. Luas wilayah pertambangan 6. Jumlah produksi 7. Nilai penjualan Domestik 8. Nilai penjualan Ekspor 9. Tujuan penjualan Domestik 10. Tujuan penjualan Ekspor 11. Jumlah yang diolah di dalam negeri.	6, 7, 8, 9 data per bulan atau d disesuaikan dengan pembayaran iuran royalti				
		IX.Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kontrak Karya dan PKP2B yang telah disetujui Ditjen	Laporan RKAB Kontraktor Kontrak Karya dan PKP2B yang telah disetujui Ditjen	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Minerba per tahun yang paling sedikit memuat : 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Tanggal disetujui RKAB	Minerba untuk setiap Kontraktor dan per tahun				berikutnya)
		X. Laporan RKAB pemegang IUP/IUPK/IPR baik mineral maupun batubara yang telah disetujui oleh penerbit IUP/IUPK/IPR per tahun yang paling sedikit memuat : 1. Nama pemegang IUP/IUPK/IPR 2. NPWP pemegang IUP/IUPK/IPR 3. Alamat pemegang IUP/IUPK/IPR 4. Lokasi IUP/IUPK/IPR 5. Luas IUP/IUPK/IPR	Laporan RKAB pemegang IUP/IUPK/IPR baik mineral maupun batubara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tanggal disetujui RKAB					
		XI. Harga Patokan Batubara (HPB) untuk setiap jenis batubara baik <i>steam coal</i> maupun <i>cooking coal</i> setiap bulan.		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Bulanan (setiap awal bulan berikutnya)
		XII. Harga Batubara Acuan (HBA) untuk setiap jenis batubara baik <i>steam coal</i> maupun <i>cooking coal</i> setiap bulan.		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Bulanan (setiap awal bulan berikutnya)
51	Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	I. Neraca Energi di Indonesia untuk jenis minyak bumi, gas bumi dan batubara, yang paling sedikit memuat : 1. Data produksi 2. Data impor 3. Data ekspor 4. Data penjualan	Data Neraca Energi di Indonesia untuk jenis minyak bumi, gas bumi dan batubara setiap tahun	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (setiap bulan April tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data komoditas mineral di Indonesia yang paling sedikit memuat : 1. Data produksi 2. Data ekspor 3. Data penjualan	Data komoditas mineral di Indonesia untuk mineral utama seperti tembaga, emas, perak, bauksit, nikel, bijih dan pasir besi, dan timah.	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (setiap bulan April tahun berikutnya)
52	Kementerian Pertanian	I. Data Pendaftaran Pupuk Anorganik, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Nomor Pendaftaran 5. Nama Dagang/Merk 6. Jenis Pupuk		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		II. Data Pendaftaran Pupuk Organik, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Nomor Pendaftaran 5. Nama Dagang/Merk 6. Jenis Pupuk					
		III. Data Pendaftaran Pestisida, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Nomor Pendaftaran 5. Nama Dagang Formulasi 6. Jumlah Formulasi 7. Pengadaan dalam tahun laporan 8. Penyaluran dalam tahun laporan		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. Data Pengujian Alat dan Mesin Pertanian, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pemohon 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. NPWP 5. Merk Dagang		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		V. Data Pendaftaran Obat Hewan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan Obat 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP 4. Nomor Pendaftaran 5. Jenis Obat 6. Data Ekspor/Impor		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VI. Data Pendaftaran Pakan Ternak, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Nama Dagang 5. Jenis Pakan 6. Kode Pakan		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		VII. Data Laporan Produksi Pakan Ternak, yang paling sedikit memuat: 1. Tahun laporan 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. NPWP Perusahaan 5. Produksi		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VIII. Data Izin Usaha Obat Hewan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Jumlah Pabrik 5. Alamat Lokasi Pabrik		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		IX. Pelayanan Pengawasan Karantina Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pengguna Jasa 2. Alamat Pengguna Jasa		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. NPWP Pengguna Jasa 4. Nama Media Pembawa 5. Negara Asal 6. Volume					
		X. Data Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pemohon 2. Alamat Pemohon 3. NPWP Pemohon 4. Jenis Tanaman 5. Banyak Benih 6. Negara Pengirim 7. Negara Tujuan 8. Tempat Pemasukan/Pengeluaran		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XI. Data Izin Pemasukan Bibit Ternak, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Negara Asal 5. Nama Bibit Ternak 6. Jenis Bibit Ternak 7. Galur/Ras/Bangsa Bibit Ternak 8. Jumlah Bibit Ternak		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		XII. Rekomendasi Teknis Pemasukan Daging, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Rekomendasi 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. NPWP Perusahaan 5. Negara Asal		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Jenis 7. Pelabuhan Masuk					
		XIII. Data Izin Pemasukan Agens Hayati, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pengguna Jasa 2. Alamat Pengguna Jasa 3. NPWP 4. Nama Agens Hayati 5. Tujuan Pemasukan 6. Asal Negara 7. Jumlah Agens Hayati		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		XIV. Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Lokasi Kebun		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Luas 6. Kapasitas 7. Jenis Ijin Usaha 8. Jenis Komoditas					
		XV. Daftar Perusahaan perkebunan Sawit, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Lokasi 5. Luas		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
53	Kementerian Komunikasi dan Informatika	I. Data Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama penyelenggara 2. Alamat 3. NPWP 4. Nomor Akta Pendirian		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Tanggal Akta Pendirian 6. Jenis Jasa 7. Nomor Izin 8. Tanggal izin 9. Jangka waktu izin					
		II. Data Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama penyelenggara 2. Alamat 3. NPWP 4. Nomor Akta Pendirian 5. Tanggal Akta Pendirian 6. Jenis Jaringan 7. Nomor Izin 8. Tanggal izin 9. Jangka waktu izin		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)
		III. Data Perizinan Lembaga Penyiaran, yang paling		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sedikit memuat: 1. Nama 2. Alamat lembaga/perusahaan 3. NPWP 4. Nomor Akta Pendirian 5. Tanggal Akta Pendirian 6. Jenis penyiaran 7. Nomor Izin 8. Tanggal izin 9. Jangka waktu izin					
		IV. Data Pemegang Standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. NPWP Perusahaan 4. Nomor sertifikat 5. Tanggal sertifikat	Jangka waktu sertifikasi tiga tahun	Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Merek-tipe 7. Negara Asal Perangkat 8. Jenis sertifikasi 9. Kelompok Alat					
		V. Data Pemegang Landing Right/Hak Labuh (Penye- lenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran), yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. NPWP Perusahaan 4. Nomor hak labuh 5. Tanggal hak labuh 6. Nama Satelit 7. Asal negara satelit 8. Jangka waktu hak		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VI. Data Pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. NPWP Perusahaan 4. Jenis <i>service</i> 5. Jenis <i>subservice</i> 6. Nomor izin 7. Tanggal izin 8. Jumlah Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)
		VII. Data Pemegang Izin Pita Frekuensi Radio (CDMA, GSM/DCS, UMTS/WCDMA, BWA), yang paling sedikit memuat: 1. Nama operator 2. Alamat		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. NPWP Perusahaan 4. Pita frekuensi 5. Nomor Izin 6. Tanggal Izin 7. Jangka waktu izin 8. Jumlah Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi					
54	Kementerian Kelautan dan Perikanan	I. Data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Perorangan 2. NPWP Perusahaan/ Perorangan 3. Alamat Perusahaan/ Perorangan 4. Domisili Hukum 5. Nomor Izin 6. Tanggal Izin		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Nomor Identitas Penanggung Jawab 8. Nama Penanggung Jawab 9. NPWP Penanggung Jawab	7. dapat berupa NIK/No Paspor				
		II. Data Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. Nama Kapal 3. Nomor Izin SIPI 4. Tanggal Izin SIPI 5. Tanggal Kadaluwarsa SIPI 6. Gross Ton 7. Alat Tangkap 8. Tanda Selar 9. Wilayah Penangkapan 10. Status Izin		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Data Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. Nama Kapal 3. Nomor Izin SIKPI 4. Tanggal Izin SIKPI 5. Tanggal Kadaluwarsa SIKPI 6. <i>Gross Ton</i> 7. Tanda Selar 8. Status Izin		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		IV. Data Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Perorangan 2. Alamat Unit Pengolahan Ikan 3. Jenis Produk	Sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasional standar sanitasi.	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nomor Izin Produk 5. Tanggal Terbit Izin Produk 6. Tanggal Masa berlaku Produk 7. NPWP Perusahaan dan/atau NIK Penanggung Jawab					
		V. Data Izin Pemasukan Hasil Perikanan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Penanggung Jawab 2. Alamat Perusahaan/ Penanggung Jawab 3. Nomor Izin 4. Tanggal Izin 5. Masa berlaku 6. Jenis Produk yang akan dimasukkan 7. Jumlah Produk yang akan		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dimasukkan 8. Tempat Pemasukkan 9. NPWP Perusahaan dan/atau NIK Penanggung Jawab					
		VI. Data Lalu Lintas Ikan di dalam dan luar negeri (ekspor, impor, antar wilayah dalam negeri), yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Perorangan 2. Alamat Perusahaan/ Perorangan 3. Nomor Izin Instalasi Karantina Ikan 4. Tanggal Izin Instalasi Karantina Ikan 5. Masa berlaku 6. Wilayah Pemasaran	Wilayah pemasaran berisi negara tujuan	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Jenis lalu lintas (ekspor, impor, antar wilayah dalam negeri) 8. Jenis Produk yang dipasarkan 9. Jumlah produk yang dipasarkan/tahun 10. NPWP Perusahaan/ Perorangan 11. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab 12. NIK Pemilik/ Penanggung Jawab					
		VII. Data Izin Penyediaan Obat Ikan (Produsen, Importir), yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Perorangan 2. NPWP Perusahaan/ Perorangan		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Alamat 4. Status (produsen/ importir) 5. Nomor Izin 6. Tanggal Izin 7. Masa berlaku 8. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab 9. NIK Pemilik/ Penanggung Jawab					
		VIII. Data Produsen Perbenihan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Perorangan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat Perusahaan/ Perorangan 4. Jenis komoditas perbenihan (tawar/payau/laut)		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Jumlah omzet tahunan (ekor) 6. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab 7. NIK Pemilik/ Penanggung Jawab					
		IX. Data Usaha Budidaya, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat 4. Jenis Perizinan 5. Nomor Izin 6. Tanggal Izin 7. Masa berlaku 8. Komoditas budidaya 9. Nama Penanggung Jawab 10. NIK Penanggung Jawab	Jenis Perizinan/ Rekomendasi: 1. Izin Pemasukan Ikan Hidup 2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan di Bidang Pembudidayaan Ikan 3. Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		X. Data Pendaftaran Pakan Ikan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Perorangan 2. Alamat Perusahaan/ Perorangan 3. Merk produk 4. Nomor Pendaftaran/ Sertifikat 5. Tanggal Terbit Pendaftaran/Sertifikat 6. Tanggal Masa berlaku 7. Jumlah produk 8. NPWP Perusahaan dan/atau NIK Penanggung Jawab	Jumlah Produk per 6 (enam) bulan	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
55	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	I. Data Pengguna Tenaga Kerja Asing, yang memuat: 1. Nama	Data pengguna tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Triwulanan, (Paling lambat tanggal 5 bulan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perusahaan/instansi 2. NPWP perusahaan/instansi 3. Alamat perusahaan/instansi 4. Nomor telepon, <i>fax</i> , <i>email</i> 5. Jumlah tenaga kerja asing	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.				berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan)
		II. Daftar Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Indonesia, yang memuat: 1. Nama LPTKS 2. NPWP LPTKS 3. Nama pimpinan atau penanggung jawab LPTKS 4. Alamat LPTKS	Data yang disampaikan sebatas data LPTKS yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Daftar Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), yang memuat: 1. Nama perusahaan 2. NPWP perusahaan 3. Nama pimpinan atau penanggung jawab 4. Alamat perusahaan	Data yang disampaikan sebatas data PPTKIS yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Desember)
56	Komisi Pemilihan Umum	I. Data Calon Anggota Legislatif, yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. NIK 3. NPWP 4. Tempat lahir 5. Tanggal lahir 6. Alamat rumah 7. Riwayat pekerjaan terakhir 8. Partai		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Daerah Pemilihan					
		II. Data Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. NIK 3. NPWP 4. Tempat lahir 5. Tanggal lahir 6. Alamat rumah 7. Riwayat pekerjaan terakhir 8. Daerah Pemilihan		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)
		III. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Partai Penerima Sumbangan		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Nama Penyumbang 3. Nomor Identitas Penyumbang 4. NPWP Penyumbang 5. Alamat Penyumbang 6. Kriteria Penyumbang 7. Bentuk sumbangan 8. Nilai sumbangan (rupiah) 9. Kuantitas sumbangan (unit) 10. Keterangan	6. perserorangan/kelompok/ badan usaha 7. uang/barang/jasa 9. Kuantitas barang yang disumbangkan				
		IV. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye calon anggota DPD, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Calon Anggota DPD Penerima		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sumbangan 2. Nama Penyumbang 3. Identitas Penyumbang 4. NPWP Penyumbang 5. Alamat Penyumbang 6. Kriteria Penyumbang 7. Bentuk sumbangan 8. Nilai sumbangan (rupiah) 9. Kuantitas sumbangan (unit) 10. Keterangan	6. perserorangan/kelompok/ badan usaha 7. uang/barang/jasa 9. kuantitas barang yang disumbangkan				
		V. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penerima Sumbangan 2. Nama Penyumbang 3. Identitas Penyumbang 4. NPWP Penyumbang 5. Alamat Penyumbang 6. Kriteria Penyumbang 7. Bentuk sumbangan 8. Nilai sumbangan (rupiah) 9. Kuantitas sumbangan (unit) 10. Keterangan	6. perserorangan/kelompok/ badan usaha 7. uang/barang/jasa 9. Kuantitas barang yang disumbangkan				
57	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	I. Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Polisi 2. Nama Pemilik 3. Alamat Pemilik 4. NPWP Pemilik		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. NIK Pemilik 6. Tahun pembuatan 7. Tahun Registrasi 8. Jenis Kendaraan 9. Merk Kendaraan 10. Tipe Kendaraan 11. Isi Silinder (cc) 12. Bahan Bakar					
		II. Data Mutasi kendaraan /perubahan identitas Kendaraan Bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Polisi lama 2. Nama Pemilik lama 3. Alamat Pemilik lama 4. NPWP Pemilik lama 5. NIK Pemilik lama 6. Nomor Polisi baru 7. Nama Pemilik baru	Data mutasi kendaraan adalah informasi yang terkait arus perpindahan kendaraan, baik itu kepemilikan maupun lokasi.	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Alamat Pemilik baru 9. NPWP baru 10. NIK Pemilik baru 11. Tahun pembuatan 12. Jenis Kendaraan 13. Merk Kendaraan 14. Tipe Kendaraan 15. Isi Silinder (cc) 16. Bahan Bakar					
58	Kementerian Pertahanan	I. Data Izin Produksi, Pengadaan, Penyimpanan, Pendistribusian dan Jasa Peledak, yang paling sedikit memuat : 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat 4. Jenis Perizinan 5. Nama Penanggung Jawab Perusahaan	5. Penanggung Jawab adalah	Elektronik	Langsung (email)	10 Desember 2014 (data mulai tahun 2013)	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Nomor KTP Penanggung Jawab 7. NPWP Penanggung Jawab	Dirut/Pihak yang nyata-nyata bertanggung jawab.				
		II. Data Informasi Peserta dan Pemenang Lelang atau Seleksi atau Penyedia Barang dan Jasa di Lingkungan Kemenhan dan TNI, yang paling sedikit memuat : 1. Nomor Kontrak 2. Nama Kontrak 3. Penyelenggara Pengadaan 4. Nama Perusahaan Pemenang Pengadaan 5. NPWP Perusahaan Pemenang Pengadaan 6. Alamat Perusahaan Pemenang Pengadaan		Elektronik	Langsung (<i>email</i>)	10 Desember 2014 (data mulai tahun 2013)	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Nama Penanggung Jawab Perusahaan 8. Nomor KTP Penanggung Jawab 9. NPWP Penanggung Jawab 10. Harga Perkiraan Sendiri 11. Nilai Kontrak					
59	Kementerian Kehutanan	I. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		II. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Luas 10. Lokasi					
		III. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanani (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		V. Data Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					Juli, Oktober, Januari)
		VI. Data Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		VII. Data Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas di atas 6000m ³ /thn (IUIPHHK >6000 m ³ /thn), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		VIII. Data Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		IX. Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan/Non Tambang, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		X. Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Survey/Eksplorasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Lokasi					
		XI. Data Izin Lembaga Konservasi (LK), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		XII. Data Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), yang paling sedikit		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		XIII. Data Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi 11. Kuota Edar Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)					
		XIV. Data Izin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPSWA), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		XV. Data Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Lokasi					
		XVI. Data Izin Ekspor Benih/ Bibit Tanaman Hutan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		XVII. Data Izin Impor Benih/Bibit Tanaman Hutan, yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					bulan April, Juli, Oktober, Januari)
60	Kementerian Koperasi dan UKM	I. Data Koperasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Koperasi 2. Nomor Badan Hukum 3. Tanggal Berdiri Koperasi 4. Alamat 5. NPWP 6. Daftar Nama Pengurus		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (setiap bulan Maret)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. NIK Pengurus 8. Bidang Usaha					
		II. Data Penerima Program Bantuan Kementerian Koperasi dan UKM, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Penerima Bantuan 2. NPWP Penerima Bantuan 3. Nomor Pendirian Badan Hukum Penerima Bantuan 4. Tanggal Pendirian Badan Hukum Penerima Bantuan 5. Alamat Penerima Bantuan 6. Tahun Anggaran 7. Nama Program 8. Nilai Bantuan (dalam rupiah)	3 dan 4 diisi jika penerima bantuan merupakan badan hukum	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (setiap bulan Maret)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61	Badan Pusat Statistik (BPS)	I. Direktori Eksportir/Importir, yang paling sedikit memuat : 1. Nama Direktori 2. Tahun 3. Nama perusahaan 4. Alamat perusahaan 5. Klasifikasi produk berdasarkan <i>Harmonized System (HS)</i>	Merupakan direktori dari 10 (sepuluh) perusahaan dengan nilai ekspor/impor terbesar dalam satu tahun.	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan
		II. Direktori Industri Manufaktur, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Alamat perusahaan 3. Klasifikasi produk berdasarkan <i>Harmonized System (HS)</i>		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan
		III. Direktori Perkebunan Sawit, yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Nama perusahaan 2. Alamat perusahaan					
		IV. Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Lapangan Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. PDB atas dasar harga berlaku 2. PDB atas dasar harga konstan 2000		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Triwulanan
		V. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. PDRB atas dasar harga berlaku 2. PDRB atas dasar harga konstan 2000	PDRB untuk tiap kabupaten/ kota dan provinsi	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VI. Statistik Impor HS Terpilih yang paling sedikit memuat: 1. Nilai 2. Berat 3. Pelabuhan 4. Nama komoditas 5. Negara asal 6. KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)/kode ISIC (<i>International Standardization Industrial Code</i>)		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Bulanan
		VII. Statistik Ekspor HS Terpilih, yang paling sedikit memuat: 1. Nilai 2. Berat 3. Pelabuhan 4. Nama komoditas		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Bulanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Negara tujuan 6. KBLI/kode ISIC					
		VIII. PDRB menurut Penggunaan, yang paling sedikit memuat: 1. PDRB atas dasar harga berlaku 2. PDRB atas dasar harga konstan 2000		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan
		IX. Peta digital wilayah seluruh Kabupaten/Kota per desa/Kelurahan		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan
		X. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) variabel terpilih	Data mikro Susenas	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan
		XI. Data sakernas variabel terpilih	Data mikro survei angkatan kerja nasional	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XII. Publikasi Tabel <i>input-Output</i>	Data yang menjelaskan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian nasional	Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan
		XIII. <i>Master file</i> desa		Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan (setiap akhir bulan Desember)
		XIV. Data potensi desa (variabel terpilih)	Data mikro	Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Am

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 195904201984021001